

Tantangan Hukum dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial

Acumen Makmur, Mia Amalia, Aji Mulyana

Fakultas Hukum Universitas Suryakencana



[10.32502/khdk.v6i1.7347](https://doi.org/10.32502/khdk.v6i1.7347)

Abstract

One of the main problems in almost every country, especially developing countries is a problem of inequality. Inequality can occur in all social aspects, this is the case caused by unequal distribution. Gaps usually occur in unequal distribution of economic aspects, which is why the term emerged socio-economic disparities. In realizing the implementation of the economic system in Indonesia by more mature, it is necessary to pay attention to several characteristics that cannot be missed in order to guarantee shared prosperity. Every economic activity is a shared responsibility for ties kinship with the provisions of various branches of production being a matter of state power as a guarantee of the right to live together. The characteristics of the Indonesian economy also provide full guarantee mixed system components without burdening its citizens. According to the economic system Pancasila every activity is carried out to maintain the safety of those who live in it.

Key-words: Economic System, Social Inequality, Inequality

Abstrak

Salah satu yang menjadi permasalahan utama hampir di setiap negara terutama negara berkembang adalah masalah kesenjangan. Kesenjangan dapat terjadi dalam segala aspek sosial, hal ini disebabkan karena ketidakmerataan pendistribusian. Kesenjangan biasanya terjadi pada ketidakmerataan pendistribusian aspek-aspek perekonomian sehingga muncullah istilah kesenjangan sosial ekonomi. Dalam mewujudkan penerapan sistem ekonomi di Indonesia dengan lebih matang perlu diperhatikan beberapa karakteristik yang tidak dapat dilewatkan demi menjamin kesejahteraan bersama. Setiap kegiatan ekonomi merupakan tanggung jawab bersama atas ikatan kekeluargaan dengan ketentuan berbagai cabang produksi menjadi urusan kekuasaan negara sebagai jaminan hak hidup bersama. Karakteristik perekonomian Indonesia juga menjamin penuh komponen sistem campuran tanpa memberatkan warga negaranya. Sesuai sistem ekonomi pancasila setiap kegiatan dilangsungkan demi menjaga keamanan mereka yang hidup di dalamnya.

Kata Kunci: Sistem Ekonomi, Kesenjangan Sosial, Ketidaksetaraan.

Info Artikel

Masuk: 4 Februari 2024, Diterima: 1 Juni 2024, Terbit: 30 Juni 2024



Email Corresponding Author:

Nama Author : acumenmakmur1991@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Kesenjangan merupakan salah satu keadaan atau kondisi yang tidak seimbang yang terdapat dalam kehidupan sosial masyarakat.¹ Maka teori keadilan sosial juga harus dibahas untuk lebih memahami ide-ide yang diperlukan untuk memperbaiki setidaknya beberapa tindakan merugikan, perilaku yang terjadi, dan hasil yang berpotensi buruk terkait dengan kemiskinan dan ketidaksetaraan keseluruhan populasi tertentu, baik di Indonesia maupun internasional.² Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan antara nilai masyarakat dengan realita yang ada, kesenjangan sosial juga merupakan distribusi yang tidak merata (ketidakadilan dan ketidaksetaraan) yang dialami oleh individu dan kelompok yang dianggap penting dalam suatu masyarakat dan penilaian tidak sama serta pengecualian berdasarkan posisi sosial dan gaya hidup.

Dalam konteks kontemporer, kesenjangan sosial menjadi salah satu masalah yang kompleks dan mendesak di banyak negara, kesenjangan tersebut meliputi kesenjangan ekonomi, pendidikan, akses ke layanan kesehatan, kesempatan kerja, dan masih banyak lagi.³ Kesenjangan sosial juga sangat terasa oleh penduduk yang bermukim di daerah pelosok. Hal ini disebabkan oleh faktor pemicu kesenjangan sosial yang menimbulkan kesenjangan antara penduduk yang memiliki akses fasilitas yang memadai, sementara penduduk yang berada di pelosok tentu tidak dapat mengakses fasilitas yang diberikan. Tidak heran jika masih banyak sekelompok orang yang belum bisa merasakan fasilitas-fasilitas yang

¹ Nur Farida and Eggy Fajar Andalas, 'Representasi Kesenjangan Sosial-Ekonomi Masyarakat Pesisir Dengan Perkotaan Dalam Novel Gadis Pantai Karya Pramodya Ananta Toer', *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 5.1 (2019), 74 <<https://doi.org/10.22219/kembara.vol5.no1.74-90>>.

² Rahmat Salam, 'Peran Kebijakan Publik Dalam Mengentaskan Kemiskinan Dan Kesenjangan Sosial', *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 2.2 (2019), 119–28 <<https://doi.org/10.54783/japp.v2i2.71>>.

³ Rifma Ghulam Dzaljad, 'Transformasi Sosial Dalam Proses Pendidikan Di Masa Pandemi Covid-19', *Maarif*, 15.2 (2020), 305–24 <<https://doi.org/10.47651/mrf.v15i2.117>>.

memadai.⁴ Tingkat kemiskinan jauh lebih tinggi di Indonesia bagian timur, tetapi kebanyakan penduduk miskin tinggal di Indonesia bagian barat yang berpenduduk padat. Meskipun tingkat kemiskinan di pulau Jawa dan Bali relatif lebih rendah, tetapi dihuni sebagian besar penduduk miskin Indonesia. Lebih dari 62,94% penduduk miskin terdapat di pulau Jawa dan Bali. Pulau Jawa memang merupakan pusat kemiskinan di Indonesia. Ini bisa jadi karena erat kaitannya dengan angka kepadatan penduduknya yang memang tertinggi daripada provinsi lain. Semakin tinggi jumlah penduduk per km² atau per hektar, semakin sempit ladang untuk bertani atau lokasi untuk membangun pabrik atau melakukan kegiatan ekonomi lainnya, semakin kecil kesempatan kerja dan sumber pendapatan, yang berarti juga semakin besar persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.⁵

Faktor penyebab kemiskinan yang ada secara empiris memiliki keragaman antara yang satu yang lainnya, sehingga kemiskinan tidak dapat disamaratakan, meskipun demikian secara garis besar kemiskinan yang ada, dapat dikategorikan menjadi faktor yang berasal dari internal yang berkaitan dengan kondisi masyarakat itu sendiri dan faktor eksternal yang berkaitan dengan faktor yang berada di luar masyarakat.⁶ Dilihat dari data Badan Pusat Statistik, Provinsi yang menjadi penyumbang penduduk miskin perkotaan terbanyak di Indonesia pada tahun 2020 yakni Jawa Barat sebanyak 3.004,95 ribu jiwa. Padahal di sisi lain, Jawa Barat merupakan wilayah yang cukup besar perannya bagi pertumbuhan ekonomi karena memberikan kontribusi sebanyak 13,1% bagi PDB Indonesia. Sehingga, jika kondisi kemiskinan yang tinggi di Jawa Barat

⁴ Tiara Della Sinta and Betti Dian Wahyuni, 'Kesenjangan Sosial Dalam Mengakses Pendidikan Di Indonesia', *Edukasia Multikultura*, 4.1 (2022), 11–28.

⁵ Iwan Prasodjo, 'Perkembangan Tingkat Kemiskinan Dan Kesenjangan Sosial Regional Di Indonesia 2011-2015', *Jurnal Ekonomi*, 22.1 (2017), 22–36 <<https://doi.org/10.24912/je.v22i1.179>>.

⁶ Dian Herdiana, 'Kemiskinan, Kesenjangan Sosial Dan Pembangunan Desa', *Jurnal Inovasi Masyarakat*, 2.3 (2022), 172–80 <<https://doi.org/10.33197/jim.vol2.iss3.2022.985>>.

kurang mendapat perhatian maka sedikit banyak akan mengganggu terhadap peran Jawa Barat bagi Indonesia dalam pembangunan perekonomian. Jika dilihat dari data BPS, persentase penduduk miskin pada 9 Kota di Jawa Barat pada tahun 2016 hingga 2019 mengalami penurunan sebesar 1,28%. Hanya saja di tahun 2020 persentase kemiskinan tersebut mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 0,81%, salah satu penyebabnya yaitu pandemi covid19. Fenomena tingginya kemiskinan perkotaan di Jawa Barat menandakan bahwa program yang dibuat oleh pemerintah belum mencapai target yang optimal sehingga perlu adanya rancangan kebijakan yang lebih efisien untuk menangani kemiskinan secara keseluruhan. Adapun upaya yang bisa dilakukan yaitu dengan memperhatikan variable yang dapat memicu turunnya tingkat kemiskinan kota antara lain yaitu kepadatan penduduk dan sanitasi.⁷

Fenomena kesenjangan sosial di Indonesia sering ditemukan. Berita-berita di media bertebaran mengangkat ketertindasan kelompok masyarakat atau individu dalam kehidupan sosial. Demikian pula yang tidak diberitakan di media soal peristiwa bersumber pada realitas sosial yang aktual terkait kesenjangan sosial pada umum dan khususnya merupakan hal yang sering terlihat.⁸ Kesenjangan sosial berdasarkan ekonomi yang ada di Indonesia terhitung tinggi sehingga kesadaran akan adanya kesenjangan tersebut dapat memicu konflik. Totalitas keyakinan dan sentimen yang umum dimiliki oleh sebagian masyarakat menciptakan sistem yang menjamin hidupnya.⁹ Kesenjangan sosial dapat berdampak

⁷ Syifa Putri Nur Azizah and others, 'Sanitasi Dan Kepadatan Penduduk Sebagai Dinamika Kemiskinan Kota Studi Kasus Provinsi Jawa Barat', *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 7.1 (2022), 55–70 <<https://doi.org/10.47200/jnajpm.v7i1.1148>>.

⁸ R Hartono, A S Nalan, and Y Heriyawati, 'Narasi Ketimpangan Sosial Dalam Pertunjukan Topeng Banjet Abah Pendul Lakon Cerita Gordon Muda', *Pantun*, 212, 2022 <<https://jurnal.isbi.ac.id/index.php/pantun/article/view/1813>>.

⁹ Nur Iman and El Hidayah, 'KOMUNIKASI: Jurnal Komunikasi Representasi Kesenjangan Sosial Ekonomi Penyataan Achmad Yurianto Dalam Konferensi Pers Penanganan Covid-19', 14.2 (2023), 145–56 <<https://doi.org/10.31294/jkom.v14i2.15735>>.

buruk pada masyarakat seperti pengangguran dan kemiskinan. Sehingga perlunya adaptasi dari masyarakat mengenai teknologi dan jika masyarakat khawatir akan norma atau aturan yang berlaku bisa memudar maka diperlukannya pembatasan penggunaan teknologi. Kesenjangan sosial bisa berdampak buruk pada keterampilan sosial, artinya kurangnya keterampilan yang dimiliki seperti keterampilan kerja sama dan komunikasi membuat masyarakat tidak dapat beradaptasi dengan arus globalisasi. Tatanan kehidupan masyarakat sejak dulu terdapat stratifikasi sosial yang terbentuk dengan sendirinya sebagai proses dan tanda bahwa masyarakat itu berkembang. Akan tetapi juga ada yang sengaja dibentuk agar mempunyai susunan dan tujuan bersama.¹⁰

Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh Karl Marx kesenjangan sosial muncul akibat adanya perkembangan masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor produksi dan metode yang digunakan. Masyarakat yang bermula menggunakan metode tradisional dalam memproduksi berkembang menjadi modern dengan adanya perkembangan teknologi dan modal sosial dalam masyarakat. Untuk mencapai pertumbuhan yang merata serta meminimalisir kesenjangan sosial dan ekonomi memerlukan usaha yang tentunya tidak mudah, karena kesenjangan tidak dapat dipisahkan dari bagaimana membangun negara agar terlepas dari lingkaran kemiskinan, keterbatasan aksesibilitas, peningkatan kesehatan penduduk, kualitas pendidikan dan sinergisitas antara masyarakat dengan aparat pemerintah.¹¹

Penelitian selanjutnya dibebankan oleh Suhendar, memperlihatkan bahwa kesenjangan di Indonesia naik karena disebabkan oleh berbagai faktor antara lain. Pertama, masih banyak banyak anak-anak Indonesia, terutama dari rumah tangga miskin dan di desa, tidak memperoleh awal

¹⁰ Mochammad Mansur and others, 'Kesenjangan Sosial Antara Masyarakat Kelas Buruh Dengan Masyarakat Elit', *Gunung Djati Conference Series*, 29 (2023), 76–85.

¹¹ T Atmayanti and M Malthuf, 'Kesenjangan Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Daerah Terpencil: Studi Kasus Desa Pulau Maringkik', *JPEK (Jurnal Pendidikan ...)*, 7.1 (2023), 104–14 <<https://doi.org/10.29408/jpek.v7i1.9155>>.

hidup yang sama dengan anak-anak dari keluarga yang lebih kaya. Akibatnya, mereka tumbuh dengan kesehatan dan keterampilan yang kurang. Sepertiga dari seluruh perbedaan pada standar hidup orang deasa Indonesia saat ini disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali mereka: pendidikan orangtua mereka, tempat mereka lahir, dan jenis kelamin. Kedua, hanya sebagian kecil sekolah tertentu memiliki keterampilan yang berguna untuk ekonomi modern dan mereka yang bisa memperoleh pemasukan lebih tinggi dari pekerjaan formal. Sebaliknya, sebagian besar pekerja tidak terampil terjebak dalam produktivitas rendah, gaji kecil, dan pekerjaan informal. Seiring waktu, kesenjangan pendapatan antara pekerja terampil dan tidak terampil mengakibatkan naiknya ketimpangan.¹²

Menurut Marini, kesenjangan sosial dipengaruhi oleh suatu pembangunan ekonomi daerah dan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu pembangunan ekonomi daerah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menjadi petunjuk kinerja ekonomi secara umum sebagai ukuran kemajuan suatu daerah, tingkat pertumbuhan, pendapatan perkapita dan pergeseran/perubahan struktur ekonomi. Pencapaian keberhasilan pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing daerah serta diperlukan perencanaan pembangunan yang terkoodinasi antar sector. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh tentang potensi-potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Keterbatasan sumber daya di suatu daerah baik sumber daya alam. Sejalan dengan pemikiran Marini yang mengatakan bahwa tolak ukur pembangunan ekonomi suatu daerah dapat berhasil jika dilihat dari peningkatan pada sektor-sektor unggulan daerah maka dalam hal ini perlu diketahui permasalahan yang terjadi dalam pembangunan daerah sehingga pemerintah daerah diharapkan dapat menyelesaikan pembangunan

¹² Hilmi Rahman Ibrahim, 'Potret Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Dan Kemiskinan Di Indonesia Dalam Tinjauan Ekonomi Politik Pembangunan', *Jurnal Ilmu Dan Budaya*, 40.50 (2017), 6305–28.

dengan baik. Permasalahan pembangunan terletak pada kebijakan-kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada kekhasan daerah tersebut, dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan dan sumberdaya fisik secara lokal atau daerah.¹³

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana tantangan hukum dalam mengatasi kesenjangan sosial. Bagaimana peran media massa dalam membentuk persepsi dan memperdalam kesenjangan sosial di masyarakat. Apakah ketidaksetaraan ekonomi menjadi faktor utama penyebab kesenjangan sosial, dan bagaimana dampaknya terhadap stabilitas sosial. Apakah ketidaksetaraan dalam akses terhadap pekerjaan dan peluang karier menjadi faktor utama kesenjangan ekonomi di masyarakat. Apakah sistem peradilan memainkan peran dalam merawat atau memperdalam kesenjangan sosial, terutama terkait dengan hak-hak individu dan kelompok minoritas¹⁴.

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis lebih mendalam mengenai tantangan hukum dalam mengatasi kesenjangan sosial. Berdasarkan kepada uraian sebagaimana dijelaskan di atas, maka artikel ini ditujukan guna mengkaji permasalahan kemiskinan yang ada di Indonesia serta kesenjangan sosial yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari kondisi kemiskinan yang ada di Indonesia. Tujuannya selain kepada menjelaskan secara rinci permasalahan kemiskinan yang ada beserta dengan faktor-faktor penyebabnya, juga dimaksudkan untuk menghasilkan suatu rekomendasi kebijakan guna menanggulangi kemiskinan yang ada di negara Indonesia, sehingga diharapkan akan turut

¹³ Deffrinica Deffri and others, 'Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Kabupaten Bengkayang)', *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10.1 (2022), 229–36 <<https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i1.1774>>.

¹⁴ Darwanto Darwanto, 'Korupsi Dan Kesenjangan Sosial', *CENDEKIA Jaya*, 4.1 (2022), 51–59 <<https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v4i1.235>>.

berkontribusi dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang tengah dilakukan di Indonesia saat ini¹⁵.

B. METODE

Dalam artikel ini, metode yang digunakan adalah metode literatur. Metode literatur atau studi kepustakaan dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan maupun internet. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Penulis menggunakan beraneka variasi sumber pustaka dan data sensus internet yang membeberkan seputar tanggungjawab sosial dalam manajemen. Untuk memperoleh data/isu penulis mengolah data dari beraneka variasi sumber isu internet. Berbagai macam variasi dan sumber rujukan yang tersedia menciptakan penulisan artikel ilmiah ini berjalan dengan baik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi bahwa kaum miskin dan terpinggirkan hanya pantas mendapatkan ketidakadilan dan jauh dari nilai-nilai kebenaran begitu kerap mendapat sambutan reaktif dari aparat penegak hukum. Seolah kaum marginal tidak pernah bertindak benar, tepat dan mendapat perlindungan hukum yang memadai. Sebaliknya, fakta yang cukup kontras justru dialamatkan pada mereka-mereka yang kuat secara finansial dan juga mayoritas dari segi populasi. Hampir tidak ada kalangan berduit yang mengeluh karena telah diperlakukan secara tidak adil. Sebagai konsekuensi lanjutannya, maka hukum dan keadilanpun bukan

¹⁵ Iman and Hidayah.

lagi milik semua orang, melainkan hanya milik segelintir orang yang sangat dekat dengan uang dan kekuasaan.¹⁶

Upaya-upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk pemecahan masalah kesenjangan sosial yang terjadi di Indonesia, yang pertama ialah meminimalis (KKN) dan memberantas korupsi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah membentuk suatu lembaga yang bertugas memberantas (KKN) di Indonesia. Indonesia telah mulai berbenah diri namun dalam beberapa kasus soal korupsi KPK dinilai masih tebang pilih dalam menindak masalah korupsi. Misalnya kasus tentang bank century belum menemukan titik terang dan seolah-olah mengakiri kasus itu. Pemerintah harus selalu berbenah diri karena dengan meminimaliskan (KKN) yang terjadi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan dana yang ada. Kedua meningkatkan system keadilan di Indonesia serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap mafia hukum. Masih banyak mafia hukum merajarela di Indonesia itu yang semakin membuat kesenjangan sosial di Indonesia makin mencolok. Keadilan saat ini sangatlah sulit untuk ditegakkan bagaimana tidak, seorang koruptor ditahan namun semua fasilitas sudah tercukupi di dalam ruang tahanan. Sedangkan bagaimana dengan nasib seorang masyarakat kecil yang hanya mencuri ayam misalnya, mereka melakukan dengan seenak mereka kadang juga mereka menyiksa dengan tidak perikemanusiaan. Hal ini sangatlah menunjukkan kesenjangan sosial di Indonesia sangatlah mencolok antara pihak kaya atau pihak yang mempunyai penguasa antara rakyat kecil atau orang miskin.

Di Indonesia, kesenjangan sosial tidak secara khusus diatur dalam satu pasal hukum tunggal. Namun, beberapa undang-undang dan regulasi menyentuh aspek-aspek yang berkaitan dengan kesenjangan sosial. Beberapa contoh yang dapat diacu termasuk: Undang-Undang Dasar 1945: Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa "segala warga negara

¹⁶ U Sholahudin, 'Pembangunan, Ketimpangan Sosial, Dan Kebutuhan Hukumnya: Menuju Penegakan Hukum Yang Berkeadilan', *Al'Adalah*, 2019, 265–302 <<http://ejournal.iain-jember.ac.id/index.php/aladalah/article/view/744>>.

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.". Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Regulasi ini memberikan dasar bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan mengurangi kesenjangan antar daerah. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*: Menyentuh masalah ketidaksetaraan di tempat kerja dan memberikan dasar bagi perlindungan hak-hak pekerja. Pasal 28 H Ayat 1 UUD 1945 lebih lanjut menyebutkan bahwa, "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Pasal 28 Ayat 1 UUD 1945 secara tegas menyatakan pengakuan Indonesia atas hak-hak lingkungan sebagai bagian dari hak-hak dasar (hak asasi manusia) masyarakat Indonesia. Keberadaan Pasal 28 H Ayat 1 UUD 1945 ini untuk menunjukkan bahwa konstitusionalisasi.

Penting untuk diingat bahwa konsep kesenjangan sosial dapat dicakup oleh berbagai aspek hukum, termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif memerlukan tinjauan lebih lanjut terhadap undang-undang dan regulasi yang mencakup berbagai bidang kehidupan.¹⁷ Kesenjangan sosial dapat berdampak buruk pada masyarakat seperti pengangguran dan kemiskinan. Sehingga perlunya adaptasi dari masyarakat mengenai teknologi dan jika masyarakat khawatir akan norma atau aturan yang berlaku bisa memudar maka diperlukannya pembatasan penggunaan teknologi. Kesenjangan sosial bisa berdampak buruk pada keterampilan sosial, artinya kurangnya keterampilan yang dimiliki seperti keterampilan kerja sama dan komunikasi membuat masyarakat tidak dapat beradaptasi dengan arus globalisasi. Tatanan kehidupan masyarakat sejak dulu terdapat stratifikasi sosial yang terbentuk dengan sendirinya sebagai

¹⁷ I Nyoman Ruja, 'Kemiskinan Dan Perubahan Sosial: Sebuah Model Transformasi Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11.3 (2022), 572–79 <<https://doi.org/10.23887/jish.v11i3.49587>>.

proses dan tanda bahwa masyarakat itu berkembang. Akan tetapi juga ada yang sengaja dibentuk agar mempunyai susunan dan tujuan bersama.¹⁸

Indonesia adalah negara berkembang, maka masalah kemiskinan merupakan masalah yang penting dan pokok dalam upaya pembangunannya. Keberagaman pandangan tentang kemiskinan menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan fenomena multi dimensi. Fenomena ini membuat pengukuran kemiskinan menjadi tidak mudah. Namun demikian, kemiskinan tetap harus diukur sebagai gambaran dan bahan pengambilan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Empat alasan kemiskinan harus diukur yaitu pertama, agar orang miskin terus berada dalam agenda dan diperhatikan, kedua pengidentifikasian orang miskin dan keperluan intervensi mengenai pengentasan kemiskinan, tiga pemantauan dan evaluasi proyek atau kebijakan intervensi terhadap orang miskin, dan empat evaluasi efektivitas lembaga-lembaga pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.

Kemiskinan masih menjadi salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Masalah kemiskinan itu sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia. Bagi mereka yang tergolong miskin, kemiskinan merupakan sesuatu yang nyata ada dalam kehidupan mereka sehari-hari, karena mereka itu merasakan dan menjalani sendiri bagaimana mereka hidup dalam kemiskinan. Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak. Kemiskinan akan membatasi kemampuan individu untuk tetap sehat dan mengembangkan keterampilannya. Masalah kemiskinan sampai saat ini masih menjadi masalah yang berkepanjangan. Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi. Kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang terkait dengan berbagai dimensi yakni sosial,

¹⁸ Mansur and others.

ekonomi, budaya, politik serta dimensi ruang dan waktu. Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak.¹⁹

Sumber daya alam yang melimpah di Jawa Barat memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Ekonomi Jawa Barat tumbuh sebesar 4,79% pada tahun 2018, dengan PDRB dengan nilai Rp 57,39 Triliun. Meskipun pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat mengalami kenaikan, tingkat kemiskinan di Jawa Barat masih tinggi. Tetapi, pada tahun 2019, kemiskinan di Jawa Barat mencapai 9,38%. Terdapat sekitar 1,38 juta jiwa warga atau 6,82% dari jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan. Meskipun sempat penurunan tingkat kemiskinan di Jawa Barat dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 17,61%. Namun, dari 6,82% penduduk yang mengalami kemiskinan, 38,7% penduduk di Jawa Barat tidak memiliki pekerjaan atau menganggur. Pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 pengangguran di Jawa Barat bertambah sebanyak 278.000 warga. Hal tersebut disebabkan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada saat Pandemi Covid19 yang dilakukan banyak perusahaan untuk menekan biaya produksi.²⁰

Salah satu Provinsi di Indonesia yang mengalami peningkatan tingkat kemiskinan adalah Provinsi Jawa Barat. Di bawah ini disajikan tabel data persentase penduduk miskin terbanyak berdasarkan Provinsi tahun 2020.

¹⁹ Kartika Berliani, 'Pengaruh Tingkat Pengangguran, Tingkat Pendidikan Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2020', *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6.2 (2021), 872 <<https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i2.2244>>.

²⁰ Muhammad Ridha Iswardhana and Universitas Teknologi Yogyakarta, 'Attina Maulidia Selma Attamimi', *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 6.2 (2023), 108–26.

Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin Terbanyak Berdasarkan Provinsi di Indonesia Periode Tahun 2020²¹

No	Provinsi	Persentase Kemiskinan
1.	Jawa Timur	11,09%
2.	Jawa Tengah	11,41%
3.	Jawa Barat	7,9%
4.	Sumatera Utara	8,75%
5.	Nusa Tenggara Timur	20,90%

Secara umum Indeks Pembangunan manusia berhubungan negatif dengan tingkat kemiskinan. Artinya semakin tinggi IPM penduduk maka semakin rendah tingkat kemiskinan. Sedangkan hubungan IPM dengan kondisi ekonomi pada umumnya juga berhubungan positif. Artinya semakin tinggi tingkat ekonomi maka semakin tinggi IPM. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat, karena nilai probabilitasnya sebesar 0,0936 atau lebih kecil dari α sebesar 0,10. Dan nilai koefisien sebesar -1.407212 artinya jika terjadi kenaikan kemiskinan sebesar 1% maka akan menurunkan IPM sebesar 1,40 poin hal ini berarti bahwa setiap peningkatan kemiskinan yang terjadi akan menurunkan IPM di Provinsi Jawa Barat, maka hasil uji dapat disimpulkan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori kemiskinan absolut dimana sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, penduduk hidup dibawah pendapatan riil minimum atau

²¹ Berliani.

dapat dikatakan hidup dibawah kemiskinan Internasional. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan BAZNAS yang menemukan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, dengan persamaannya yaitu variabel kemiskinan menunjukkan koefisien sebesar $-0,079$ artinya jika terjadi kenaikan kemiskinan sebesar 1% maka akan menurunkan IPM sebesar $0,079\%$ artinya setiap peningkatan kemiskinan akan menurunkan persentase IPM. Hal ini dikarenakan tingkat kemiskinan pada tahun 2020-2021 mengalami peningkatan, yang ditandai dengan meningkatnya harga eceran komoditas pokok, dan tingkat pengangguran mengalami peningkatan.²²

D. KESIMPULAN

Indonesia masih dilanda kesenjangan sosial yang dipengaruhi beberapa faktor, dan hukum itu sendiri belum bisa mengatasi kesenjangan sosial di masyarakat. Sampai saat ini kesenjangan sosial masih menjadi tantangan tersendiri bagi hukum dalam mengatasinya. Maka penegakan hukum harus segera gencar mencari solusi yang sekaligus meminimalisir kesenjangan sosial pada masyarakat. Karena kemiskinan di Indonesia masih menjadi masalah serius yang masih dihadapi oleh banyak penduduk. Faktor-faktor seperti ketidaksetaraan pendapatan, akses terbatas ke pendidikan dan layanan kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, semuanya berkontribusi terhadap tingginya tingkat kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan memerlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

²² Abie Rachman Muhamad and Dewi Rahmi, 'Pengaruh Teknologi, Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Barat 2007-2021', *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 2023, 45–52 <<https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i1.1924>>.

Salah satunya seperti upaya aktif dari pemerintah untuk mengatasi kesenjangan sosial seperti yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing dan punya keahlian untuk bekerja, dengan demikian masyarakat akan mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua, memberi akses yang sama kepada seluruh masyarakat untuk menggunakan fasilitas kesehatan, pendidikan, teknologi, dan ekonomi. Dengan memberi akses yang sama, kesenjangan sosial bisa berkurang karena tidak ada perbedaan di kelompok masyarakat. Terakhir pemerataan pembangunan, pemerintah harus melakukan pemerataan pembangunan atau tidak hanya berfokus di satu daerah saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abie Rachman Muhamad, and Dewi Rahmi, 'Pengaruh Teknologi, Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Barat 2007-2021', *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 2023, 45–52 <<https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i1.1924>>
- Atmayanti, T, and M Malthuf, 'Kesenjangan Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Daerah Terpencil: Studi Kasus Desa Pulau Maringkik', *JPEK (Jurnal Pendidikan ...)*, 7.1 (2023), 104–14 <<https://doi.org/10.29408/jpek.v7i1.9155>>
- Berliani, Kartika, 'Pengaruh Tingkat Pengangguran, Tingkat Pendidikan Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2020', *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6.2 (2021), 872 <<https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i2.2244>>
- Darwanto, Darwanto, 'Korupsi Dan Kesenjangan Sosial', *CENDEKIA Jaya*, 4.1 (2022), 51–59 <<https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v4i1.235>>
- Deffri, Deffrinica, Helena Anggraeni Tjondro, Firminus Firman, and Hermansius Riki, 'Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan

- (Studi Kasus Kabupaten Bengkayang)', *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10.1 (2022), 229–36
<<https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i1.1774>>
- Dzaljad, Rifma Ghulam, 'Transformasi Sosial Dalam Proses Pendidikan Di Masa Pandemi Covid-19', *Maarif*, 15.2 (2020), 305–24
<<https://doi.org/10.47651/mrf.v15i2.117>>
- Farida, Nur, and Eggy Fajar Andalas, 'Representasi Kesenjangan Sosial-Ekonomi Masyarakat Pesisir Dengan Perkotaan Dalam Novel Gadis Pantai Karya Pramodya Ananta Toer', *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 5.1 (2019), 74
<<https://doi.org/10.22219/kembara.vol5.no1.74-90>>
- Hartono, R, A S Nalan, and Y Heriyawati, 'Narasi Ketimpangan Sosial Dalam Pertunjukan Topeng Banjet Abah Pendul Lakon Cerita Gordon Muda', *Pantun*, 212, 2022
<<https://jurnal.isbi.ac.id/index.php/pantun/article/view/1813>>
- Herdiana, Dian, 'Kemiskinan, Kesenjangan Sosial Dan Pembangunan Desa', *Jurnal Inovasi Masyarakat*, 2.3 (2022), 172–80
<<https://doi.org/10.33197/jim.vol2.iss3.2022.985>>
- Ibrahim, Hilmi Rahman, 'Potret Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Dan Kemiskinan Di Indonesia Dalam Tinjauan Ekonomi Politik Pembangunan', *Jurnal Ilmu Dan Budaya*, 40.50 (2017), 6305–28
- Iman, Nur, and El Hidayah, 'KOMUNIKASI: Jurnal Komunikasi Representasi Kesenjangan Sosial Ekonomi Pernyataan Achmad Yurianto Dalam Konferensi Pers Penanganan Covid-19', 14.2 (2023), 145–56
<<https://doi.org/10.31294/jkom.v14i2.15735>>
- Mansur, Mochammad, M Qomarul Huda, Taufik Alamin, Trimurti Ningtyas, and Program Studi Sosiologi Agama, 'Kesenjangan Sosial Antara Masyarakat Kelas Buruh Dengan Masyarakat Elit', *Gunung Djati Conference Series*, 29 (2023), 76–85
- Nur Azizah, Syifa Putri, Liliani Sumarni Pratiwi, Ima Amaliah, and Freska Fitriyana, 'Sanitasi Dan Kepadatan Penduduk Sebagai Dinamika

- Kemiskinan Kota Studi Kasus Provinsi Jawa Barat’, *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 7.1 (2022), 55–70
<<https://doi.org/10.47200/jnajpm.v7i1.1148>>
- Prasodjo, Iwan, ‘Perkembangan Tingkat Kemiskinan Dan Kesenjangan Sosial Regional Di Indonesia 2011-2015’, *Jurnal Ekonomi*, 22.1 (2017), 22–36
<<https://doi.org/10.24912/je.v22i1.179>>
- Ridha Iswardhana, Muhammad, and Universitas Teknologi Yogyakarta, ‘Attina Maulidia Selma Attamimi’, *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 6.2 (2023), 108–26
- Ruja, I Nyoman, ‘Kemiskinan Dan Perubahan Sosial: Sebuah Model Transformasi Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia’, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11.3 (2022), 572–79
<<https://doi.org/10.23887/jish.v11i3.49587>>
- Salam, Rahmat, ‘Peran Kebijakan Publik Dalam Mengentaskan Kemiskinan Dan Kesenjangan Sosial’, *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 2.2 (2019), 119–28
<<https://doi.org/10.54783/japp.v2i2.71>>
- Sholahudin, U, ‘Pembangunan, Ketimpangan Sosial, Dan Kebutuhan Hukumnya: Menuju Penegakan Hukum Yang Berkeadilan’, *Al’Adalah*, 2019, 265–302
<<http://ejournal.iain-jember.ac.id/index.php/aladalah/article/view/744>>
- Sinta, Tiara Della, and Betti Dian Wahyuni, ‘Kesenjangan Sosial Dalam Mengakses Pendidikan Di Indonesia’, *Edukasia Multikultura*, 4.1 (2022), 11–28